

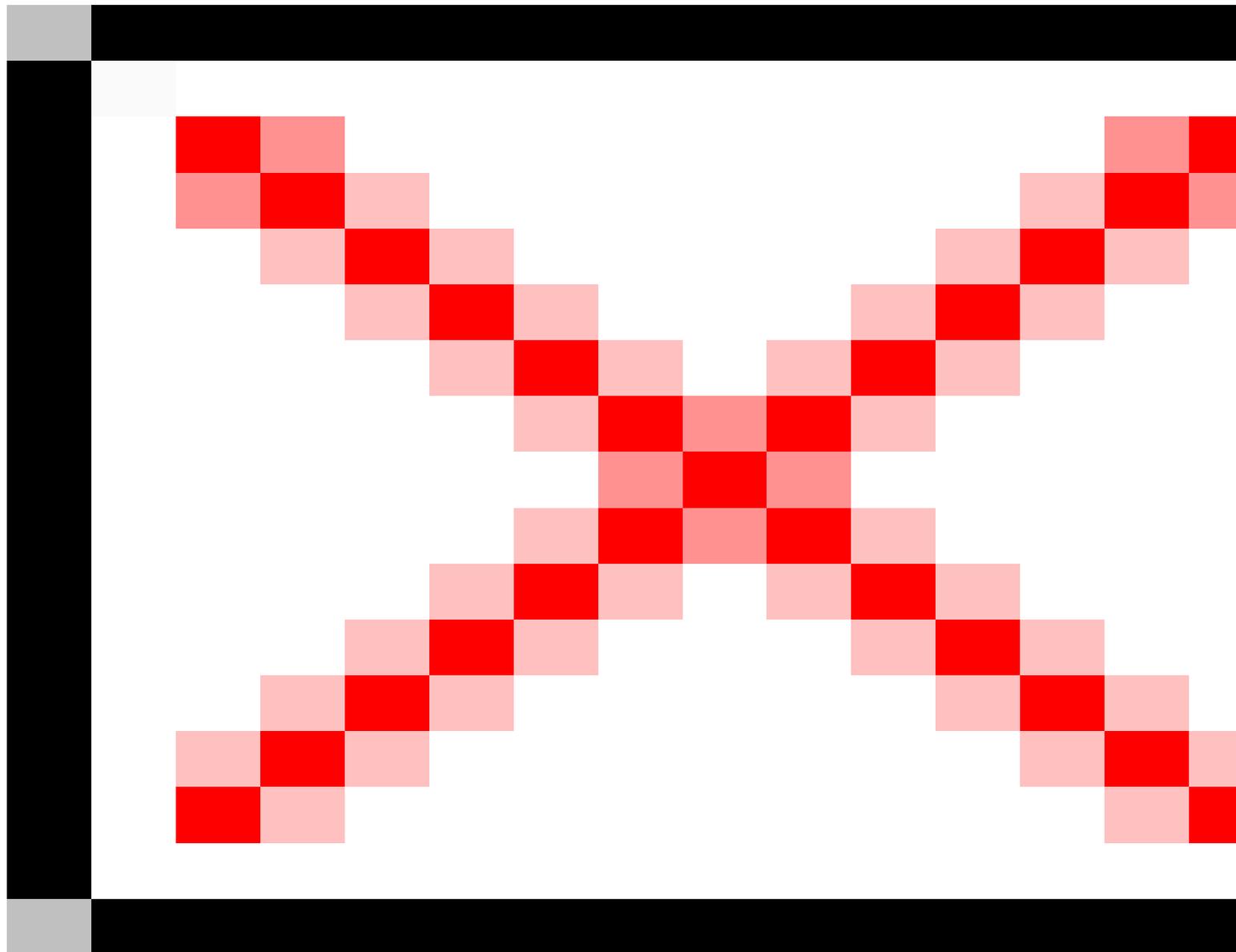
Dosen Antropologi Unimal Menjadi Pembicara di Seminar Revisi UU PA



Dosen Antropologi Unimal Menjadi Pembicara Seminar Revisi UU PA. Foto: Ist

UNIMALNEWS| Banda Aceh – Dosen Antropologi Fisip Universitas Malikussaleh, Teuku Kemal Fasya, menjadi salah seorang pembicara dalam Focus Group Discussion dengan tema “Arah Kebijakan Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh”. Kegiatan itu dilaksanakan di Multipurpose Auditorium Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, pada tanggal 12 Mei 2022. Kegiatan ini terselenggara berkat kerja sama dengan Kesekjenan DPR RI.

Pada sambutannya, Sekjen DPR R.I, Dr Indra Iskandar menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat pelaksanaan Otonomi Khusus di Aceh. Karena menurutnya, selama ini masih ada kendala yang itu berupa masalah regulasi yang tidak sesuai dengan keberadaan UU No 11 tahun 2006 atau Undang-Undang Pemerintahan Aceh. UU PA sendiri yang telah berumur 16 tahun ini memiliki beberapa pasal yang perlu direvisi karena adanya judicial review dari Mahkamah Konstitusi dan perubahan nomenklatur kelembagaan dan sistem hukum. Oleh karena itu, revisi ini juga bagian dari proses harmonisasi dan sinkronisasi pada produk hukum yang berlaku saat ini.



Pada FGD yang dihadiri dari berbagai kalangan, baik akademisi, aktivis LSM, dan juga aktivis politik hadir beberapa pembicara yaitu Samsul, S.H., M.Hum (Kepala Badan Keahlian DPR RI), Dr.M. Gaussyah,SH.,MH (Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala), Teuku Kemal Fasya, S.Ag, M.Hum (Dosen Antropologi FISIP Universitas Malikussaleh), Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH, PhD (Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh), dan Dr Afrizal Tjoetra, MSi (Wakil Dekan 1 Fakultas Fisipol Universitas Malikussaleh) pada sesi pertama. Adapun pada sesi kedua hadir Azhari,SIP (Ketua Badan Reintegrasi Aceh), Dr. Nazamuddin, SE, MA (Ketua Komisi Kerjasama, Mediasi dan Publikasi Majelis Pendidikan Aceh), Tgk Faisal M Ali (Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama), dan Tgk M. Husein (Ketua Majelis Adat Aceh) sebagai pembicara.

Dalam penyampaianannya, Kemal, menyatakan bahwa pada saat ini tidak lagi terjadi perdebatan pada aspek ontologis apakah UU PA itu ada atau tidak, karena pada aspek ontologis setiap orang pasti bersepakat tentang pentingnya merevisi UU PA demi memperkuat proses kesejahteraan di Aceh. Yang menjadi masalah adalah pada aspek epistemologis dan aksiologis, yaitu memperkuat argumen

Tanggal: 11 May 2022

Post by: [Tami](#)

Kategori: [News](#),

Tags: [Unimal](#),